



LAPORAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK) TRIWULAN I TAHUN 2023

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2023



HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

Disahkan oleh
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tanggal: 23 Maret 2023



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pemantauan dan EVauasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan komitmen Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan tata kelola birokrasi bebas dari korupsi. Laporan ini disusun sebagai pemenuhan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bersih dari praktik KKN. Selain itu, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi yang bersih dan bebas KKN dan berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dengan prima Ber-AKHLAK dan CANTIK (Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel).

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya internal dan eksternal masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 23 Maret 2023

Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas





DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Tujuan Kegiatan.....	4
1.4 Hasil yang Diharapkan.....	4
BAB II HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK) ..	5
2.1 Pengungkit I	5
2.2 Pengungkit II	11
2.3 Pengungkit III.....	12
2.4 Pengungkit IV	14
2.5 Pengungkit V	15
2.6 Pengungkit VI.....	16
BAB III SIMPULAN DAN REKOMENDASI	25
3.1 Simpulan	25
3.2 Rekomendasi	25
Lampiran.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemendikbudristek bertekad menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam program pendidikan. Dengan mempertimbangkan integritas Kemendikbudristek tersebut, pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kemendikbudristek ditetapkan. Sebagai bagian dari Kemendikbudristek, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selayaknya pula memiliki komitmen integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam layanan birokrasi dilingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga instansi pemerintah dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu

peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di internal lembaga menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh warga lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga dapat mencapai sasaran hasil utama reformasi birokrasi.

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pembinaan dan Penembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang dipilih untuk menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilaksanakan Pemantauan dan evaluasi terhadap Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 sebagai berikut.

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. SK Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 0515/I5.I8/KP.04.00/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan untuk memastikan tim RBI telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga capaian target periodik pembangunan ZI-WBK dapat terukur dengan baik.

1.4 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari laporan ini adalah memantau dan mengevaluasi data dan gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan dan meraih predikat kantor yang memiliki komitmen Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

BAB II

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Bahasa Provinsi NTB sebagai berikut.

2.1 Pengungkit I

1. Penyusunan Tim Kerja ZI-WBK

- a. Menyusun Mekanisme Pemilihan Tim Kerja
Mekanisme pemilihan tim kerja telah dibuat sebagai dasar pembentukan tim kerja. Mekanisme pemilihan tim kerja tercantum dalam Buku Panduan RBI Tahun 2023 yang disusun bersama dengan Tim RBI Tahun 2022.
- b. Pembentukan Tim Kerja
Pembentukan tim kerja dilakukan melalui rapat penyusunan tim kerja dengan melibatkan Kepala Kantor, Ketua Tim RBI Tahun 2022, dan koordinator tiap pengungkit tahun 2022. Tim kerja disahkan melalui surat keputusan nomor 0107/I5.18/LK.06.00/2023.

2. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan ZI-WBK

a. Menyusun Rencana Kerja ZI-WBK

Renja telah disusun melalui rapat kerja penyusunan renja yang dilakukan oleh tiap pengungkit. Renja dibentuk melalui matriks kerja sesuai komponen pengungkit dengan target waktu penyelesaian. Renja telah dilengkapi target-target prioritas.

b. Menyusun target-target prioritas yang relevan

Target prioritas disusun sesuai dengan komponen pengungkit disertai pembuatan inovasi yang mendukung peningkatan aspek-aspek pengungkit.

c. Membuat media sosialisasi ZI-WBK

Sosialisasi telah dilakukan secara berkala melalui media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram dalam konten **Senandung ZI**. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan mengunjungi kantor-kantor di sekitar Kantor Bahasa dan satuan kerja mitra Kantor Bahasa Provinsi NTB.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

- a. Menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan integritas

Instrumen disusun dengan mempertimbangkan instrument uji tahun 2022. Perlu adanya tindak lanjut berupa pelaksanaan monev sesuai dengan instrument yang telah disusun.

- b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan ZI-WBK

Pemantauan dan evaluasi (*Monev*) masih dilakukan selama tiga bulan sekali. Perlu adanya peningkatan pengawasan dengan melakukan monev dengan kuantitas lebih rutin dengan memperhatikan instrumen evaluasi.

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

- a. Menetapkan pedoman pemilihan Agen Perubahan

Pedoman pemilihan agen perubahan dirumuskan ulang melalui rapat kerja dengan prosedur pemilihan yang lebih terbuka dan memperhatikan kompetensi pegawai. Pemilihan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu seleksi portofolio,

wawancara, dan penilaian dan pertimbangan Kepala Kantor. Pemilihan diikuti oleh seluruh pegawai, baik ASN maupun PPNPN.

b. Menetapkan Agen Perubahan

Penetapan Agen Perubahan dilakukan sesuai prosedur hingga menghasilkan 5 Agen Perubahan yang tercantum dalam surat keputusan nomor 0363/I5.18/LK.06.00/2023 dengan fokus kerja tiap-tiap agen menciptakan perubahan pada aspek

- (1) Kedisiplinan dan Ketertiban
- (2) Kepedulian
- (3) Profesionalisme
- (4) Integritas
- (5) Kebersihan.

Terdapat perubahan Agen Perubahan atas dasar mutasi pegawai. Keputusan pergantian ini mengingat penting dan segera untuk menetapkan agen perubahan bidang kepedulian.

c. Menetapkan pedoman penetapan *Role Model*
Role Model ditetapkan bersamaan dengan pedoman penetapan agen perubahan. *Role Model* telah dipilih berdasarkan kecakapan pengelolaan individu.

d. Menetapkan *Role Model*

Pimpinan menjadi *role model* dalam pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Nomor 0364/15.18./LK.06/2023. *Role model* menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Zona Integritas menuju WBK disiplin kerja, peningkatan mutu pelayanan disampaikan pada kegiatan apel pagi dan rapat staf.

e. Melaksanakan Pelatihan Budaya Kerja dan Pola Pikir

Pelatihan budaya kerja terus dilakukan, baik secara formal maupun informal.

(1) Peningkatan disiplin dilakukan dengan sosialisai aturan disiplin pegawai di awal tahun.

(2) Evaluasi dilakukan secara mingguan melalui apel pagi.

(3) *Role Model* memberi contoh dalam berbagai aspek, baik kedisiplinan, integritas, hingga kebersihan.

Pelaksanaan Program Prioritas:

- (1) Melakukan pemilihan role model dan agen perubahan dengan standar yang jelas sehingga diperoleh agen-agen perubahan yang mampu menggerakkan aksi perubahan pola pikir dan budaya kerja. Program prioritas ini dijalankan melalui inovasi Pemilu Agen Perubahan. Program prioritas ini telah dijalankan sesuai prosedur yang telah dibuat.
- (2) Melakukan pemantauan potensi perubahan dan pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam hal ketertiban, kedisiplinan, integritas, profesionalisme, kepedulian, dan kebersihan.

Optimalisasi peran agen perubahan membutuhkan tindak lanjut melalui evaluasi kinerja Agen Perubahan dengan penyusunan program yang jelas. Agen Perubahan dan *Role Model* perlu dipastikan tetap mengawal jalannya perubahan dan inovasi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.2 Pengungkit II

- (1) POS telah dilengkapi dengan pembuatan bagan alir yang lebih sederhana, jelas, dan mewakili tiap kegiatan dan program kerja Kantor Bahasa Provinsi NTB.
- (2) SPBE dijalankan dengan optimalisasi aplikasi Sidaya
- (3) Keterbukaan Informasi Publik terus dilakukan dengan memperlengkap informasi dalam PPID Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Pelaksanaan Program Prioritas:

Sebagai langkah untuk meningkatkan kepedulian pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB terhadap POS, Pengungkit II menginisiasi adanya POS BAR. POS BAR adalah wujud POS yang telah dibuat oleh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. POS dalam bentuk kode bar ini akan dipasang di setiap meja pegawai. Hal ini sebagai usaha untuk meningkatkan kepedulian pegawai terhadap alur kerja masing-masing pekerjaan. Harapannya dengan adanya POS BAR ini, pegawai dapat bekerja secara sistematis, sesuai bagan alur dan waktu penyelesaian dalam POS.

Pos Bar dibuat dalam bentuk inovasi Mandalika I-POS. Aplikasi ini membuat POS dapat diakses dengan

mudah oleh setiap pegawai sehingga menciptakan sistem kerja terarah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2.3 Pengungkit III

- (1) Telah dilakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan Peningkatan Mutu Pegawai dalam Rangka Gerakan Literasi Nasional. Peningkatan kompetensi mencakup peningkatan bakat fotografi, wicara publik, pelayanan public, dan penulisan puisi.
- (2) Telah dilakukan sosialisasi tentang
 - (a) Peraturan Penegakan Disiplin PNS berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021.
 - (b) Kode Etik dan Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Permendikbud No. 48 Tahun 2020.
 - (c) Kelas Jabatan Balai dan Kantor Bahasa Kemendikbudristek berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 18/O/2023.

Pelaksanaan Program Prioritas:

Mandalika-BISA (Berbagi Ilmu untuk Siapa sAja)

Memberikan pengimbasan hasil pengembangan kompetensi yang telah diikuti atau diperoleh pegawai

dari suatu diklat/pelatihan/bimtek/seminar/dll. dengan cara berbagi materi kegiatan melalui WhatsApp Grup. Ilmu atau informasi baru yang didapatkan oleh satu pegawai dapat berimbas kepada pegawai lain secara tidak langsung, hal ini dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pengembangan kompetensi sebagai bagian dari pemenuhan kesejahteraan ASN seperti yang diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan Peraturan LAN tersebut, pengembangan kompetensi melalui pelatihan terdiri atas pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal. Pelatihan klasikal merupakan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan mengacu kurikulum. Pelatihan non klasikal merupakan proses praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas dan dilaksanakan melalui jalur pertukaran PNS dengan pegawai swasta; magang/praktik kerja; *benchmarking* atau *study visit*; pelatihan jarak jauh; *coaching*; mentoring; detasering; penugasan terkait program prioritas; *e-learning*; belajar mandiri/*self-*

development; team building; dan jalur lain yang memenuhi ketentuan pelatihan non-klasikal.

2.4 Pengungkit IV

(1) Penyusunan Lakin 2022

Laporan kinerja disusun setelah mendapat pembinaan dari tim pelaporan pusat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kerja Kantor Bahasa Provinsi NTB pada tahun 2022 dengan disertai rekomendasi dan rencana tindak lanjut di tahun 2023.

(2) Penyusunan PK

Perjanjian kinerja satker dan individu telah disusun dengan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi pengisian PK. Penyusunan PK satker dilaksanakan sekaligus dengan penyusunan renja ZI-WBK dan menghasilkan 7 Sasaran Kinerja yang harus dipenuhi.

(3) Rapat Evaluasi

Rapat evaluasi capaian kinerja dilaksanakan setiap bulan dan telah terlaksana selama 2 bulan di tahun 2023, yakni bulan Januari dan Februari.

Pelaksanaan Program Prioritas:

Mandalika-BIKA (Berbagi Informasi Keuangan)

BIKA adalah inovasi mengenai informasi keuangan interen pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB melalui tautan google drive yang akan dibagikan secara pribadi. Inovasi ini membantu pegawai baik ASN maupun PPNPN untuk mengetahui informasi mengenai keuangan yang masuk ke rekening pegawai. Perbedaannya dengan internet atau mobile banking adalah informasi yang disampaikan lebih rinci contoh slip gaji, uang makan, uang lembur, honorium, maupun jumlah rincian perjalanan dinas yang diajukan melalui SPM ke KPPN. Dengan inovasi ini, pegawai dapat mengetahui rincian nominal uang yang masuk ke rekening pegawai.

2.5 Pengungkit V

Telah dibentuk berbagai tim untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Kantor Bahasa Provinsi NTB. Tim-tim yang telah dibentuk adalah Tim Pengendalian Gratifikasi, Tim SPIP, dan Tim ULT. Selain itu, telah diluncurkan pula inovasi yang diberi nama Mandalika-MARI yang berguna untuk pengendalian risiko pada setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB melalui tautan google formulir. Inovasi ini berusaha mengubah sudut pandang dalam mengumpulkan data risiko yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar lebih

mudah dan cepat sehingga evaluasi terhadap resiko bisa segera dilakukan.

2.6 Pengungkit VI

(1) Forum Konsultasi Publik (FKP)

FKP yang dilakukan dalam rangka menghimpun masukan atas standar pelayanan yang dimiliki oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB dilakukan dengan mengundang pihak mitra, perwakilan pengguna layanan pada tahun-tahun sebelumnya, dan penanggung jawab layanan. FKP menghasilkan data calon responden survey kepuasan masyarakat dan standar pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini turut menghimpun komitmen dalam mendukung Kantor Bahasa Provinsi NTB menuju ZI-WBK.

(2) Survei Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan masyarakat Triwulan I telah dilakukan oleh 30 responden yang berasal dari pengguna layanan Kantor Bahasa Provinsi NTB melalui aplikasi Siazik. Nilai IPKP sebesar 3.97 dan nilai IPAK mencapai 4.

Pelaksanaan Program Prioritas:

(a) Mandalika-Udara (Unit Layanan Terpadu (ULT) Daring Bermanfaat)

Mandalika-Udara menysar para pengguna layanan untuk mengakses layanan terpadu dalam satu wadah grup WhatsApp. Dalam hal ini, akselerasi komunikasi, layanan, dan aduan menjadi prioritas utama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Telah dijalankan setelah FKP terlaksanan.

(b) Mandalika-Dewisali (Desa Wisata Literasi):

Telah dilakukan dengan menggaet Desa Wisata Hijau Bilebante untuk diberi pembinaan terkait literasi dan kebahasaan. Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara rutin setiap hari Jumat.

(c) Mandalika Bumi (BIPA untuk Masyarakat Inovatif)

(1) Mandalika-Bumi dengan sasaran utama adalah keterlibatan aktif para pemelajar untuk menghidupkan BIPA di NTB. Dalam program ini, tujuan akhir adalah kontribusi nyata Kantor Bahasa sebagai lembaga yang menaungi perhimpunan pemelajar BIPA untuk mampu mengembangkan kompetensi dan aksi nyata dalam penginternasionalisasian bahasa Indonesia. Selain

itu, tujuan besar jangka panjang yang diharapkan adalah program ini mampu menjalin kemitraan dengan cakupan luas yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti misalnya KEK Mandalika di Lombok Tengah. (2) Mandalika-BUMI adalah inovasi layanan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB, berupa penyusunan dan penyediaan bahan ajar BIPA berbasis budaya, fasilitasi lembaga pengajar BIPA, pengajaran BIPA, dan penyediaan tenaga pengajar BIPA.

Tabel Hasil Pemantauan dan Evaluasi

No.	Program/kegiatan	Indikator	Aksi/Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik	Bukti Fisik Tersedia		Keterangan
I	Manajemen Perubahan					Ya	Tidak	
		1. Penyusunan Tim kerja	Membentuk tim kerja dan anggota	Januari 2023	SK Tim, undangan, daftar hadir, notulen, laporan pembentukan tim	Ya		
			Membuat mekanisme penentuan anggota tim	Januari 2023	Mekanisme tim kerja	Ya		
		2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	Dokumen rencana kerja	Januari 2023	Dokumen Rencana Kerja pembangunan, undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan	Ya		
			Target prioritas	Januari 2023	Dokumen Rencana kerja dan rencana aksi tiap pengungkit yang terdapat target prioritas	Ya		
		3. Pemantauan dan evaluasi	Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana	Maret 2023	Laporan perkembangan per	Ya		

					<u>triwulan, undangan,</u> <u>daftar hadir, notulen</u>			
			<u>Monitoring dan</u> <u>evaluasi</u>	<u>Maret 2023</u>	<u>laporan hasil</u> <u>monitoring dan</u> <u>evaluasi secara</u> <u>triwulan, daftar</u> <u>Hadir,</u> <u>Notula,Dokumentasi</u>	Ya		
			<u>Tindak lanjut hasil</u> <u>money</u>	<u>April 2023</u>	<u>Dokumen laporan hasil</u> <u>money dan tindak</u> <u>lanjut (proses)</u>	Ya		
		<u>4. Perubahan pola</u> <u>pikir dan</u> <u>budaya kerja</u>	<u>pimpinan sebagai</u> <u>role model</u>	<u>Februari 2023</u>	<u>SK Role model, daftar</u> <u>hadir pimpinan per</u> <u>bulan, LKHPN, Pakta</u> <u>Integritas</u>	Ya		
			<u>Penetapan agen</u> <u>perubahan</u>	<u>Januari 2023</u>	<u>1. SK Agen perubahan</u> <u>sudah ada.</u> <u>2. undangan rapat;</u> <u>3. dokumen laporan</u> <u>pelaksanaan</u> <u>penetapan</u> <u>agen</u> <u>perubahan;</u> <u>dan</u> <u>4. publikasi agen</u> <u>perubahan di</u> <u>lingkungan satuan</u> <u>kerja dan sekitarnya</u>	Ya		

BAB III

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Simpulan

Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya melaksanakan pembangunan ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan rencana kerja pembangunan ZI-WBK yang telah disusun sebagaimana tergambar dalam hasil pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut triwulan I tahun 2023. Hasil Pemantauan dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

3.2 Rekomendasi

Tindak lanjut berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI-WBK triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- (1) Penjadwalan dapat dievaluasi kembali apabila dipandang perlu untuk memaksimalkan proses dan hasil.
- (2) Bukti kegiatan didokumentasikan dengan baik.
- (3) Monev dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih intens dengan kuantitas lebih banyak dan kualitas lebih baik.
- (4) Perlu adanya penjadwalan evaluasi kinerja

Agen Perubahan disertai penyusunan program kerja secara jelas.

- (5) Inovasi yang harus dikawal Agen Perubahan perlu dipertegas dengan indikator keberhasilan dampak inovasi yang terukur.
- (6) Pengawasan POS dengan setiap kegiatan perlu disertai POS.
- (7) Pembaharuan data PPID disertai laporan rutin.
- (8) Peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang administratif.
- (9) Pelaksanaan aturan disiplin dengan disertai reward dan *punishment*.
- (10) Melakukan pembaharuan Sistem Informasi Kepegawaian secara berkala.
- (11) Rapat Evaluasi Capaian Kinerja secara rutin setiap bulan.
- (12) Pelaporan informasi keuangan melalui inovasi Mandalika-BIKA.
- (13) Pelaporan secara tertulis laporan gratifikasi.
- (14) Penghimpunan mitigasi risiko sesuai prosedur secara lengkap.
- (15) Evaluasi tiap kegiatan melalui inovasi Mandalika-Mari.
- (16) Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II.
- (17) Peningkatan dalam inovasi Mandalika-BUMI dan Mandalika-Dewisali melalui pelaporan hasil kegiatan.
- (18) Sosialisasi Pelayanan ULT berkala.

Lampiran Dokumentasi Kegiatan Pemantaun dan Evaluasi Triwulan I



